



# Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kurnia Muharram<sup>1\*</sup>, Sultan<sup>2</sup>, dan Rifqa Ayu Dasila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palopo; Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922; e-mail : [kurniamuharram@gmail.com](mailto:kurniamuharram@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Palopo; Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922; e-mail : [sultan@umpalopo.ac.id](mailto:sultan@umpalopo.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palopo; Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922; e-mail : [rifqaayudasila@umpalopo.ac.id](mailto:rifqaayudasila@umpalopo.ac.id)

\* Corresponding Author : Kurnia muharram

**Abstract:** This study examines the effects of accountability in village financial management, transparency, and village policy on community welfare. Using a quantitative approach and multiple linear regression analysis of 53 respondents in Ponrang Sub-district, Luwu Regency, the results show that accountability has a negative effect, while transparency and village policy have a significant positive effect on community welfare. Village policy is identified as the most dominant variable. These findings reinforce public sector governance theory, highlighting the important role of transparency and policy quality in improving community welfare. This study emphasizes the importance of balancing control and flexibility in village financial management.

**Keywords:** Accountability; Transparency; Village Policy; Community Welfare

**Abstrak:** Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda terhadap 53 responden di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif, sedangkan transparansi dan kebijakan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desa menjadi variabel paling dominan. Temuan ini memperkuat teori tata kelola sektor publik bahwa transparansi dan kualitas kebijakan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengendalian dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Kebijakan Desa; Kesejahteraan Masyarakat

Naskah Masuk: 25 November 2025

Revisi: 4 Desember 2025

Diterima: 7 Maret 2026

Terbit: 9 Maret 2026

Ver. Skrg.: 9 Maret 2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## 1. Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pengembangan desa yang berkelanjutan. Peran pemerintah desa sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat [10]. Dalam hal ini, tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan elemen penting untuk memastikan penggunaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata [9]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk melalui Dana Desa. Namun, pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dapat menghambat tujuan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola keuangan yang baik serta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan optimal [2].

Kebijakan desa yang disusun secara partisipatif berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Dalam konteks ini, kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Penelitian oleh [4] menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa meningkat sebesar 15% dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan fasilitas umum guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun alokasi dana mengalami peningkatan, pemanfaatan dana secara efisien masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh warga.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa dalam penggunaan anggaran secara efisien dan tepat Sasaran. Penerapan prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Bahwa pemahaman akuntabilitas dan sistem informasi yang baik dikalangan aparatur desa berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan desa [5]. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan diperlukan agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran secara lebih efektif dan bertanggung jawab [15]. Dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat desa, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam akuntabilitas. Keterbukaan informasi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan kebijakan desa memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa telah menerapkan transparansi dengan menyediakan informasi tentang penggunaan dana melalui papan informasi dan forum musyawarah desa (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat secara langsung [3]. Transparansi dalam pengelolaan dana desa bukan hanya meningkatkan efektivitas alokasi anggaran tetapi juga mencegah praktik korupsi di tingkat desa [12]. Dengan demikian, keterbukaan dalam penggunaan anggaran desa tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Menurut data dari kampung KB, transparansi informasi telah meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa sumber daya desa dikelola dengan benar dan adil.

Salah satu bentuk kebijakan yang menunjukkan hasil positif adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa. BUMDes berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan berbagai layanan dan produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut penelitian [8], BUMDes yang dikelola dengan baik telah memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Luwu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan BUMDes, diharapkan kesejahteraan ekonomi warga dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat di Desa perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampak dari kebijakan dan program yang diterapkan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, indikator kesejahteraan mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, pemerintah desa dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan dana desa masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian. Banyak desa, termasuk, menghadapi kendala seperti pemanfaatan dana yang belum optimal dan keterbatasan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi aparat desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan Kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan desa demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## 2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

### 2.1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

*Teori stewardship* merupakan gambaran situasi para manajer yang lebih focus pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi dan tidak berfokus pada tujuan individual. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasarannya organisasinya. Dalam sistem pemerintah, pemerintah menjadi tokoh steward yang bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan dan harapan principal mereka yaitu masyarakat. Maksud dari tujuan masyarakat disini adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadi tujuan para steward guna memenuhi kepentingan sasaran organisasi pemerintahan.

### 2.2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban secara administratif dan teknis oleh pemerintah desa dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh [7] menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat menerima dan percaya bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel, baik secara teknis maupun administratif, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga ad pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

**H1: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.**

### 2.3. Transparansi

Transparansi mengacu pada prinsip keterbukaan terhadap masyarakat mengenai informasi yang akurat dan jujur terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian oleh [6] mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam studi [11], yang menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penyampaian informasi secara terbuka mengenai dana desa dan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa, masyarakat menilai bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara transparan, sehingga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menduga terdapat pengaruh Transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.

**H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.**

## 2.4. Kebijakan Desa

Menurut [14] menjelaskan bahwa kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah mampu memberikan layanan dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Dana desa berperan penting untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa serta melaksanakan program-program desa.

Pemerintah daerah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan desanya sendiri. Kewenangan ini terutama berkaitan dengan pemberian pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan potensi, inisiatif, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, pemerintah desa diberikan hak otonomi untuk menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pelayanan publik, keterlibatan masyarakat, inisiatif lokal, dan program pemberdayaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

**H3: Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.**

## 2.5. Kesejahteraan Masyarakat

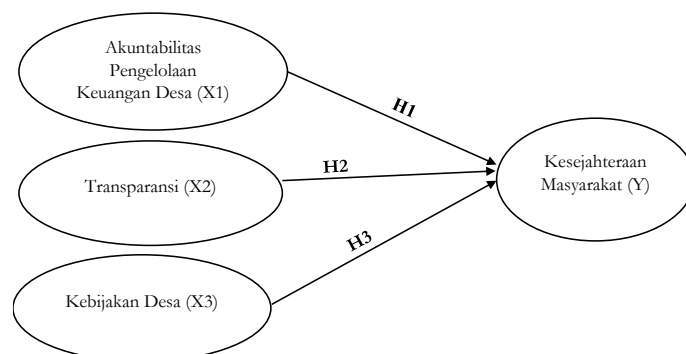
Menurut Fahrudin dalam [1], kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, serta memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak guna menunjang kualitas hidupnya. Dengan tercapainya kondisi tersebut, seseorang dapat hidup dengan rasa aman, terbebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, dan kekhawatiran, sehingga tercipta ketenteraman secara lahir dan batin.

Sementara itu, Sasauw menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini mencakup tiga aspek utama: pertama, pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial; kedua, peningkatan kualitas hidup melalui pendapatan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan kemanusiaan; ketiga, perluasan kapasitas ekonomi dan pilihan sosial bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual warga negara, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan potensi diri guna menjalankan fungsi sosialnya. Kebutuhan material yang dimaksud mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

Namun, permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum mendapatkan layanan sosial dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya dan tidak dapat hidup secara layak.

## 2.6. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.** Kerangka

### 3. Metode yang Diusulkan

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terpilih.

#### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Nanna, Buntu Kamiri, dan Desa Tirowali. Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari [5].

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa [5]. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan 60 responden, yang terdiri atas 30 aparat desa dan 30 unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda) yang pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan keterwakilan data dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.

#### 3.3. Sumber dan Metode pengumpulan data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang digunakan dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan mengajukan beberapa butir pernyataan secara personal kepada masyarakat desa yang telah dipilih oleh peneliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria atau tujuan tertentu, sehingga tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Adapun untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin yang dikemukakan oleh Robert Slovin pada tahun 1960, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dengan N adalah jumlah populasi dan e adalah tingkat kesalahan yang ditetapkan peneliti. Dalam penelitian ini, jumlah populasi (N) adalah 150 orang, sedangkan tingkat kesalahan (e) ditetapkan sebesar 10% (0,1) untuk memperoleh ukuran sampel yang representatif. Berdasarkan perhitungan. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden.

Teknik pengumpulan data menggunakan skala likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat setuju (SS=5), Setuju (S=4), Netral (N=3), Tidak setuju (TS=2), Dan Sangat Tidak Setuju (STS=1).

#### 3.4. Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki variable independent (bebas) dan variable dependen (terikat), variabel independent (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X1), Transparansi (X2), dan Kebijakan Desa (X3). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dimana penelitian ini menjadi variabel terikat adalah Kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Operasional Variabel

| No | Variabel                                           | Defenisi                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                          | Referensi          |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Akuntabilitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa (X1) | Proses dimana pemerintah<br>desabertanggungjawab atas pengelolaan<br>dana desa dengan cara yang transparan,<br>efisien dan dapat di pertanggungjawabkan. | -Tingkat keterbukaan laporan<br>keuangan desa<br>- Kesesuaian penggunaan dana dengan<br>peruntukan<br>- Pemantauan penggunaan dana | Kuswandi,<br>2020  |
| 2  | Transparansi (X2)                                  | Kemampuan masyarakat untuk<br>memperoleh informasi yang jelas dan<br>terbuka mengenai pengelolaan keuangan<br>desa serta kebijakan yang ada.             | -Akses masyarakat terhadap informasi<br>keuangan desa<br>-Keterlibatan masyarakat dalam proses<br>perencanaan                      | Kurniawan,<br>2019 |
| 3  | Kebijakan Desa (X3)                                | Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah<br>desa yang berfokus pada pembangunan dan<br>kesejahteraan masyarakat.                                        | - Keberlanjutan kebijakan<br>pembangunan desa<br>-Dampak kebijakan terhadap kondisi<br>sosial ekonomi                              | Sengaji,<br>2018   |
| 4  | Kesejahteraan<br>Masyarakat (Y)                    | Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh<br>masyarakat desa, yang mencakup aspek<br>ekonomi, sosial, dan kualitas hidup secara<br>keseluruhan.          | -Pendapatan perkapita<br>-Akses terhadap fasilitas umum<br>-Tingkat kepuasan masyarakat terhadap<br>pelayanan desa.                | Kuswandi,<br>2020  |

### 3.5. Metode Analisis Data

Dalam pengumpulan data, digunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Proses ini melibatkan analisis statistik deskriptif serta penyebaran kuesioner kepada responden. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik guna memastikan kelayakan model, yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Dalam analisis ini, tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5%. Masalah multikolinearitas dianggap tidak terjadi apabila nilai toleransi lebih dari 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Sementara itu, untuk memastikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, nilai signifikansi residual absolut harus melebihi 0,05. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang meliputi uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Adapun bentuk persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Kesejahteraan masyarakat  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = koefisien Regresi  
 $X_1$  = Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  
 $X_2$  = Transparansi  
 $X_3$  = Kebijakan Desa  
 $e$  = Error

## 4. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 2.** Pengembalian Kuesioner

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kusioner disebar     | 60 |
| Kusioner Kembali     | 60 |
| Kusioner tidak valid | 7  |
| Kusioner lengkap     | 53 |

Pada tabel 2, kusioner disebar sebanyak 60 kusioner kepada responden yang berada di tiga desa di kecamatan ponrang, kabupaten luwu. hasil distribusi kusioner didapatkan hasil berupa 60 kusioner yang kembali namun terdapat 7 kusioner tidak valid. Sehingga, kusioner yang digunakan untuk kebutuhan dalam penelitian berjumlah 53 kusioner.

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 3.** Statistik Deskriptif

|                                    | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | 53 | 29.00   | 50.00   | 42.6981 | 5.88866        |
| Transparansi                       | 53 | 35.00   | 50.00   | 43.1509 | 5.01688        |
| Kebijakan Desa                     | 53 | 35.00   | 50.00   | 44.1321 | 4.76380        |
| Kesejahteraan Masyarakat           | 53 | 37.00   | 50.00   | 44.5660 | 4.55948        |
| Valid N (listwise)                 | 53 |         |         |         |                |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Menurut [16], analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif mencakup ukuran-ukuran seperti mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari variabel yang dianalisis. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memahami bagaimana distribusi data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Hal ini memberikan gambaran awal mengenai penyebaran data serta pola distribusi variabel yang akan dianalisis lebih lanjut dalam uji asumsi klasik dan regresi.

#### 4.1.2. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan kusioner untuk mengevaluasi validitas informasi yang diperoleh. Menurut Ghazali (2018), butir-butir pertanyaan dalam kusioner dapat dianggap valid jika nilai  $r$  hitung melebihi nilai  $r$  tabel pada uji validitas. Dengan  $\alpha=5\%$  dan  $df=n-2$  ( $53-2$ ) =51, nilai  $r$  tabel adalah 0,270.

**Tabel 4.** Hasil Uji Validitas

| Variabel                           | item | <i>rhitung</i> | <i>rtabel</i> | Keterangan |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|------------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | X1.1 | 0,807          | 0,270         | valid      |
|                                    | X1.2 | 0,855          | 0,270         | valid      |
|                                    | X1.3 | 0,861          | 0,270         | valid      |
|                                    | X1.4 | 0,857          | 0,270         | valid      |
|                                    | X1.5 | 0,821          | 0,270         | valid      |
|                                    | X1.6 | 0,884          | 0,270         | valid      |
| Transparansi                       | X2.1 | 0,781          | 0,270         | valid      |
|                                    | X2.2 | 0,885          | 0,270         | valid      |
|                                    | X2.3 | 0,895          | 0,270         | valid      |
|                                    | X2.4 | 0,830          | 0,270         | valid      |
|                                    | X2.5 | 0,793          | 0,270         | valid      |
|                                    | X2.6 | 0,854          | 0,270         | valid      |
| Kebijakan Desa                     | X3.1 | 0,734          | 0,270         | valid      |
|                                    | X3.2 | 0,705          | 0,270         | valid      |
|                                    | X3.3 | 0,696          | 0,270         | valid      |
|                                    | X3.4 | 0,844          | 0,270         | valid      |
|                                    | X3.5 | 0,815          | 0,270         | valid      |
|                                    | X3.6 | 0,839          | 0,270         | valid      |
| Kesejahteraan Masyarakat           | Y.1  | 0,803          | 0,270         | valid      |
|                                    | Y.2  | 0,821          | 0,270         | valid      |
|                                    | Y.3  | 0,778          | 0,270         | valid      |
|                                    | Y.4  | 0,819          | 0,270         | valid      |
|                                    | Y.5  | 0,827          | 0,270         | valid      |
|                                    | Y.6  | 0,827          | 0,270         | valid      |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4. Maka dapat disimpulkan semua indikator dinyatakan valid, karena  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,270).

#### 4.1.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten hasil pengukuran dari kuesioner yang digunakan berulang kali. Menurut [16], jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, instrumen dianggap reliabel.

**Tabel 5.** Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel                           | N    | Nilai            | Nilai        | Keterangan |
|------------------------------------|------|------------------|--------------|------------|
|                                    | Item | Cronbach's Alpha | Perbandingan |            |
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | 6    | .926             | 0,60         | Reliabel   |
| Transparansi                       | 6    | .927             | 0,60         | Reliabel   |
| Kebijakan Desa                     | 6    | .909             | 0,60         | Reliabel   |
| Kesejahteraan Masyarakat           | 6    | .916             | 0,60         | Reliabel   |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Tabel 5 menunjukkan hasil uji reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach's Alpha: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Transparansi, Kebijakan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat dinyatakan reliabel karena memenuhi syarat dan memiliki koefisien reliabilitas nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

#### 4.1.4. Uji Normalitas

Menurut [16], uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual merupakan salah satu asumsi dasar dalam regresi linear klasik yang harus dipenuhi agar hasil estimasi tidak bias.

**Tabel 6.** Hasil Uji Normalitas (1-Sample K-S Test)

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 53                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 0.0000000               |
|                                  | Std. Deviation | 1.87843467              |
|                                  | Absolute       | 0.139                   |
| Most Extreme Differences         | Positive       | 0.139                   |
|                                  | Negative       | 0-.109                  |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | 1.012                   |
| <b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>    |                | <b>0.258</b>            |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

#### 4.1.5. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas diuji dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.

**Tabel 7.** Hasil Uji Multikolinearitas (Collinearity Diagnostics)

| Variabel                           | Tolerance | VIF   |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | .262      | 3.810 |

|                |      |       |
|----------------|------|-------|
| Transparansi   | .115 | 8.696 |
| Kebijakan Desa | .206 | 4.847 |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

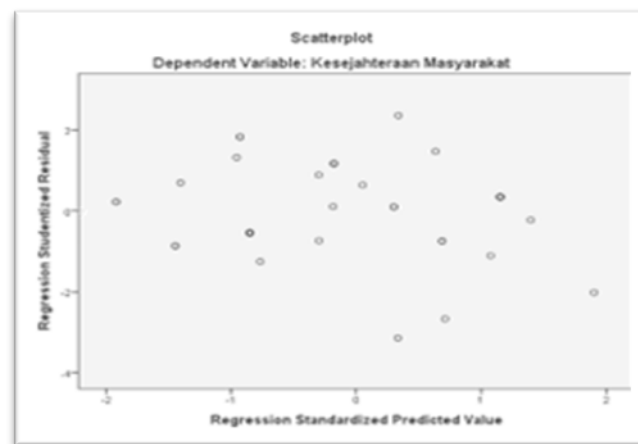
Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan Tolerance di atas 0.1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, sehingga setiap variabel independen dapat dianalisis secara terpisah.

#### 4.1.6. Uji Heteroskedastisitas

##### Analisis Scatterplot

Menurut [16], heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan pada semua tingkat variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan analisis scatterplot.

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.



Gambar 2. Scatterplot

Hasil analisis scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

##### Glejser-Test

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser-Test)

| Model          | Coefficients <sup>a</sup>     |            | Standardized Coefficients Beta | t      | Sig. |
|----------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
|                | Unstandardized Coefficients B | Std. Error |                                |        |      |
| (Constant)     | 2.476                         | 1.474      |                                | 1.679  | .099 |
| Akuntabilitas  |                               |            |                                |        |      |
| Pengelolaan    | -.046                         | .052       | -.233                          | -.891  | .378 |
| Keuangan       |                               |            |                                |        |      |
| Transparansi   | -.109                         | .093       | -.463                          | -1.172 | .247 |
| Kebijakan Desa | .128                          | .073       | .518                           | 1.757  | .085 |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

#### 4.1.7. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut [16], regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

**Tabel 9.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model                              | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                                    | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)                         | 7.761                       | 2.512      |                           | 3.089  | .003 |
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | -.347                       | .089       | -.448                     | -3.896 | .000 |
| Transparansi                       | .411                        | .158       | .452                      | 2.604  | .012 |
| Kebijakan Desa                     | .768                        | .124       | .802                      | 6.189  | .000 |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Interpretasi lebih lanjut dilakukan pada uji parsial dan uji simultan.

$$Y = 7.761 - 0.347X_1 + 0.411X_2 + 0.768X_3 + e$$

dilakukan pada uji parsial dan uji simultan.

#### 4.1.8. Uji Parsial

Menurut [16], uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%).

**Tabel 10.** Hasil Uji Parsial (T) T-Test)

| Model                              | Coefficients <sup>a</sup> |                |       |                  |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|------------------|
|                                    | <i>t</i> hitung           | <i>t</i> tabel | Sign. | Nilai Pembanding |
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | -3.896                    | 2.009          | .000  | < 0,05 (5%)      |
| 1    Transparansi                  | 2.604                     | 2.009          | .012  | < 0,05 (5%)      |
| Kebijakan Desa                     | 6.189                     | 2.009          | .000  | < 0,05 (5%)      |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk setiap variabel independen lebih kecil dari 0.05 (5%), yang berarti bahwa secara parsial, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

#### 4.1.9. Uji Simultan

Menuru[16], uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 11.** Hasil Uji Simultan (F-Test)

| ANOVA <sup>a</sup> |                |    |             |        |                   |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| Regression         | 897.536        | 3  | 299.179     | 79.897 | .000 <sup>b</sup> |
| 1 Residual         | 183.483        | 49 | 3.745       |        |                   |
| Total              | 1081.019       | 52 |             |        |                   |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa secara simultan, model regresi berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel dependen.

#### 4.1.10. Uji Koefisien Determinasi

Menurut [16], uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 12.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ -Test)

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .911 <sup>a</sup> | .830     | .820              | 1.93508                    |

Sumber: data diolah SPSS, 2024

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yakni 0,820, yang berarti bahwa 82,0% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## 4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta konsisten dengan penelitian terdahulu. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori *Stewardship*, yang menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai pengelola (steward) yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan utama organisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 4.2.1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik akuntabilitas di lokasi penelitian cenderung terfokus pada aspek administratif dan kepatuhan prosedur, sementara efektivitas program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat belum menjadi prioritas utama. Dominasi aktivitas pelaporan, pemeriksaan dokumen, dan mekanisme pengawasan berbasis birokrasi berkontribusi pada perlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga manfaat program belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dalam waktu yang cepat.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif Teori *Stewardship*, yang memandang aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik bagi kepentingan masyarakat. Namun, ketika sistem akuntabilitas lebih menekankan kontrol administratif

dibandingkan capaian kinerja substantif, aparat desa cenderung berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini memunculkan kekakuan birokrasi yang mengurangi fleksibilitas dan kecepatan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat desa turut memperkuat dampak tersebut. Beban kerja yang tinggi akibat tuntutan pelaporan dan audit menyebabkan berkurangnya fokus pada perencanaan program berbasis hasil. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang berorientasi kepatuhan, di mana akuntabilitas dipandang lebih sebagai kewajiban administratif daripada instrumen peningkatan kinerja.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil [7] yang menemukan pengaruh positif antara akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dampak akuntabilitas sangat bergantung pada konteks dan kualitas implementasinya. Dalam konteks penelitian ini, penerapan akuntabilitas masih bersifat formalistik sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

#### 4.2.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan transparansi adalah sikap terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dan dapat memastikan dana digunakan untuk tujuan yang mendukung kesejahteraan mereka.

Menurut Teori *Stewardship*, pemerintah desa sebagai pengelola bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memungkinkan masyarakat sebagai pihak yang diwakili (principal) untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [6], yang menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika informasi mengenai penggunaan dana desa dipublikasikan secara terbuka, baik melalui musyawarah desa (Musrenbang) maupun media informasi lainnya seperti papan pengumuman desa, masyarakat lebih percaya bahwa dana tersebut digunakan dengan baik untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, transparansi menjadi faktor penting dalam mendukung pemerintah desa sebagai steward dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.2.3. Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desa memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan desa yang dirancang dengan baik dan berfokus pada kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan kebijakan desa adalah pelaksanaan kebijakan pembangunan desa yang berlangsung secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat menjamin bahwa program-program pembangunan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau penyelenggaraan pelatihan keterampilan, adalah contoh nyata peran pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam perspektif Teori *Stewardship*, kebijakan desa yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat. Kebijakan yang pro-rakyat, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau program

pelatihan keterampilan bagi masyarakat, merupakan bentuk nyata peran pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [14], yang menyatakan bahwa kebijakan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang tepat, pemerintah desa dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan dampak yang nyata dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan transparansi dan kebijakan desa berdampak positif. Akuntabilitas yang terlalu bersifat administratif dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program, sementara transparansi mendorong partisipasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kebijakan desa yang tepat, khususnya upaya penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Saran

Pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat penerapan akuntabilitas agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada efektivitas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi perlu terus ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, kebijakan desa sebaiknya lebih diarahkan pada program-program strategis, khususnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

Dari sisi akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti kualitas sumber daya manusia aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan wilayah studi serta menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed methods, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola keuangan desa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- [1] Alfatus Sholikhah, N., Azima Azam, S., Ayu Bestari, D., Khoirul Huda, M., & Yunita, R. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global | Sholikhah. Dkk Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). In *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* (Vol. 1, Issue 1).
- [2] Alif, R., & Hazmi, A. (2024). Analisis faktor keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak. In *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 4, Issue 6).
- [3] Erna Hendrawati, M. P. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa.
- [4] Fadhlil, M., & Annisa, Y. (2024). Masyarakat Madani partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial ekonomi. *Jurnal Masyarakat Madani*, 9(1).
- [5] Gunawan. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, Desentralisasi, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.
- [6] Hariono Kurniawan, T., & Efendi, D. (2019). Pengaruh penggunaan ADD, Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- [7] Kuswanti. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Empiris pada Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik).
- [8] Nurhalima. (2022). Peran badan usaha milik desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa pada Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- [9] Nurul Fadilah, E., Dhea Amanda, E., Rifdah Nabilla, H., Ainul Lathifah, I., Mukaromah, L., Ayu Widya Ningrum, C., Lintang Yudhanti, A., Sunan Ampel Surabaya, U., Kunci, K., Syariah, A., Islam, E., Pesantren, P., Keuangan, L., & Syariah, P. (2024).

- Pengoptimalan Pengelolaan Keuangan Pesantren: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Akuntansi Syariah Untuk Pengurus Pesantren PPM. Al Jawi Surabaya Tahun 2024. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- [10] Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040-3049.
- [11] Sari, M. T. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- [12] Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 341-354.
- [13] Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas badan usaha milikdesa (BUMDES) dalam meningkatkan masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- [14] Sengaji, I. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa Nur Fadrih Asyik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- [15] Sultan, S., Kasran, M., Thamrin, A. N., Riyanti, R., Syamsuddin, S., Sahrir, S., ... & Irma, I. (2024). Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko pada umkm spbu perdana sawerigading. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 2314-2322.
- [16] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. In A. Tejokusumo (Ed.), *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.